



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 8 (delapan)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: Menteri Koperasi RI
Hari, Tanggal	: Senin, 8 September 2025
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi RI Tahun Anggaran 2026
Hadir	: 1. 29 orang dari 47 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. a. Menteri Koperasi RI, Sdr. Budi Arie Setiadi; b. Wakil Menteri Koperasi RI, Sdr. Ferry Juliantono; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada pukul 10.46 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 8 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Drs. H.A.M. Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri Koperasi RI terkait Pagu Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran T.A 2026 nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Pagu Anggaran Belanja K/L dan DAK Khusus TA 2026, sebesar Rp937.043.615.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri dari 2 Program yaitu:
 - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp 313.254.340.000,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
 - b. Program perkoperasian sebesar Rp 623.789.275.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Koperasi RI dan mendukung usulan tambahan Kementerian Koperasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 ,- (*Tujuh Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Dukungan manajemen sebesar Rp 514.128.436.000,- (*Lima Ratus Empat Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*)
 - b. Perkoperasian: regular sebesar Rp 2.813.039.275.000,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*)
 - c. Perkoperasian: dana dekonsentrasi sebesar Rp 4.527.491.040.000,- (*Empat Triliun Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi RI untuk masuk klasifikasi Kementerian Negara kelompok II dan akan mengkomunikasikan kepada pimpinan DPR RI untuk disampaikan ke Presiden.

4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi RI untuk mengadakan simposium penyusunan Peta Jalan” Tripola” Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan data Desa/Kelurahan presisi sebagai data dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi RI untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas serapan anggaran agar lonjakan alokasi dapat dikelola secara efektif tanpa meninggalkan sisa yang besar;
 - b. memastikan efektivitas belanja sehingga setiap rupiah benar-benar memberikan dampak nyata bagi konsolidasi koperasi, percepatan digitalisasi, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan dana dekonsentrasi, melalui sistem monitoring yang ketat untuk mencegah tumpang tindih program dan menjamin ketepatan sasaran;
 - d. memfokuskan pelaksanaan program pada Operasionalisasi dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang meliputi penyusunan bisnis model kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan aset, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan digitalisasi melalui platform SIMKOPDES, guna memperkuat ekosistem koperasi di tingkat akar rumput secara nyata dan berkelanjutan, seperti revitalisasi pasar desa;
 - e. menyusun peta jalan dalam model Tripola kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - f. membentuk komite etik koperasi di pusat dan tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penerapan sistem pengawasan yang terpadu, berbasis data, serta akuntabel, guna menjamin keberlanjutan program dan peningkatan tata kelola koperasi di tingkat desa/kelurahan.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI secara jelas dan lengkap.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.17 WIB.

MENTERI KOPERASI RI,

Ttd.

BUDI ARIE SETIADI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

Prof. Dr. Drs. H.A.M. NURDIN HALID
A-48